

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP NO. 14 TAHUN 2019
TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING
(Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep)
IMPLEMENTATION OF SUMENEP REGENT REGULATION NO 14 OF
2019 CONCERNING THE ACCELERATION OF STUNTING
MANAGEMENT
(Study at the Sumenep Districk Health Office)**

Oleh :

Unti Nur Halisah¹, Dra. Irma Irawati P², Roos Yuliastina³
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiararaja Madura
E-mail: nurkhalisahunti@gmail.com

Abstract

Existence of a policy that is being implemented by the Sumenep city government regarding Perbup no. 14 of 2019 concerning the acceleration of stunting prevention. This regulation is based on the increasing number of stunting that occurs in children under five at the age of 0-23 days. The government needs to take decisive steps to implement the policy properly. The purpose of this study was to determine the implementation of a local government policy regarding the acceleration of stunting prevention and the socialization of a policy on acceleration of stunting prevention in Sumenep Regency. This research uses descriptive qualitative research that is conducting intensive direct research, conducting in-depth observations and describing, presenting facts in the field. The results of this study are the Sumenep district government has implemented a stunting countermeasure policy. The policy implementation is carried out with the Mazmanian and Sabatier approach model (characteristics of the problem, characteristics of the policy or laws and environmental variables) and direct and indirect socialization. Direct socialization by the Health Service in collaboration with Puskesmas, regional apparatus and community leaders. Indirectly, through Radio, billboards, pamphlets, and mobile broadcasts as well as the Health Service in collaboration with the fisheries service, and the agriculture service. The agriculture service, and the fisheries service, help provide sensitive nutrition interventions in the form of activities outside the health service. There is an indirect socialization and direct socialization about stunting countermeasures, and make the community aware of the healthy community movement and clean society. Sumenep has decreased in the last five years stunting rate in 2013 52.5% decreased in 2018 32.81%.

Keywords: Policy Implementation, Acceleration Of Stunting Countermeasures, And Stunting Reduction.

Abstrak

Sebuah kebijakan yang sedang diterapkan oleh pemerintah kota Sumenep mengenai Perbup no. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan *stunting*. Peraturan ini didasari semakin tingginya angka *stunting* yang terjadi pada anak balita di usia 0-23 hari. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas agar terlaksana dengan baik kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari sebuah kebijakan pemerintah daerah tentang percepatan penanggulangan *stunting* dan sosialisasi dari sebuah kebijakan tentang percepatan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sumenep. Metode ini menggunakan metode kualitatif diskriptif yaitu melakukan metode dengan tiga cara yaitu

melakukan wawancara, melakukan observasi secara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Sumenep telah melaksanakan kebijakan penanggulangan *stunting*. Implementasi kebijakan dilakukan dengan model pendekatan Mazmanian dan Sabatier (karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau undang-undang dan variabel lingkungan) dan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisai secara langsung Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas, Perangkat daerah dan tokoh masyarakat. Secara tidak langsung, melalui Radio, baliho, pamflet, dan siaran keliling serta Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas perikanan, dan Dinas pertanian. Dinas pertanian, dan dinas perikanan, membantu memberikan interfensi gizi sensitif diselenggarakan berupa kegiatan di luar Dinas kesehatan. Adanya sosialisasi tidak langsung dan sosialisasi secara langsung tentang penanggulangan *stunting*, dan menyadarkan masyarakat untuk ikut gerakan masyarakat sehat,serta masyarakat bersih. Sumenep mengalami penurunan selama lima tahun terkahir angka *stunting* pada tahun 2013 52,5% mengalami penurunan pada tahun 2018 32,81%.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Percepatan Penanggulangan *Stunting*, Dan Penurunan *Stunting*.

1. PENDAHULUAN

Tantangan besar sumber daya manusia sekarang ini di karenakan 60 persen SDM tenaga kerja masih berpendidikan SD dan SMP dan hanya 20 persen yang berlatar belakang tinggi. Dan kondisi ini masih diperburuk dengan persoalan *stunting*.

Stunting pada intinya adalah gizi buruk dan rendahnya kemampuan kognitif. Sebagaimana disampaikan oleh Plt kepala LIPI Bambang Subiyanto pada penyelenggaraan Widyakarya Pangan Nasional dan Gizi (WNPG) tahun 2018 pada 3-4 2018, bahwa persoalan *stunting* menjadi sorotan utama yaitu “permasalahan pemilihan pangan yang berkualitas dan gizi yang seimbang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Indonesia harus memiliki SDM yang berdaya saing agar mampu nantinya bersaing di era komunikasi dan teknologi saat ini. Untuk mencapai kemampuan tersebut, maka negeri ini harus menyelesaikan persoalan *stunting* jika ingin lebih meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Kemudian untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan *stunting*, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknologi tinggi, kecerdasan dan daya fisik produktif. Sebagai mana

kita ketahui *stunting* saat ini menjadi salah satu faktor dari permasalahan kualitas sumber daya manusia yang tidak produktif di Indonesia. Jadi perlu adanya kesiapan yang di mulai dari sejak dini. Karena kedepannya sumber daya manusia di Indonesia akan semakin di hadapkan dengan kemajuan dan perkembangan iptek dan telekomunikasi yang semakin cepat.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya atau otak tidak berkembang dengan baik. Seorang anak dinyatakan *Stunting* apabila indeks panjang badan dibandingkan dengan umur (PB/U) atau tinggi badan dibandingkan dengan umur (TB/U) dengan batas (*z-score*) kurang dari -2 SD (www.tnp2k.go.id). Ada 8,9 juta anak Indonesia yang kurang gizi, prevelensi *stunting* sebesar 37,2 persen. Dari data tersebut bisa kita bayangkan apabila satu dari tiga anak di Indonesia tumbuh tidak sempurna karena menderita *stunting* maka secara garis besar akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang tidak produktif.

Angka *stunting* di Indonesia menjadi salah satu masalah yang paling banyak disoroti, karena berkaitan dengan masa depan anak-anak bangsa Indonesia yang akan menjadi investasi di masa depan agar tidak mengalami *loss*

generation. Berdasarkan hasil riset pada tahun 2013 menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai angka 37,8 persen sedangkan pada tahun 2019 mencapai 16,29 persen. Hal ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Akan tetapi WHO mengatakan Indonesia masih berada di bawah target dengan angka di bawah 20 persen. Oleh karena itu salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting sebagai upaya agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal serta mampu berinovasi dan berkompetensi di tingkat global. Dalam mengatasi permasalahan *stunting*, perlu adanya peran dari semua sektor dan tatanan masyarakat.

12 Kabupaten di Jawa Timur Kabupaten Sumenep termasuk kedalam angka *stunting* yang tinggi, dengan wilayah yang mempunyai penderita *stunting* paling banyak. Terbukti pada tahun 2013 sebesar 52,5 persen dan pada tahun 2018 34,5 persen, sedangkan pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Sumenep masih tidak memiliki data keseluruhan, namun salah satu Kecamatan Batang-batang Desa Nyabakan di Kabupaten Sumenep menjadi desa paling banyak kasus *stunting*. Meskipun angka tersebut telah mengalami penurunan yang mencapai angka 18,2 persen, namun angka ini masih terbilang tinggi dari prevalensi

stunting di tingkat nasional yang mencapai 16,29 persen.

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Sumenep membentuk peraturan yang berupa Perbup Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan *stunting* yang bertujuan untuk mengatasi masalah *stunting* sesuai dengan pasal 8 ayat (1) konvergensi bertujuan mengsinergikan seluruh upaya pendekatan intervensi gizi yang dilakukan untuk percepatan penanggulangan *stunting* dengan memperhatikan koordinasi, integrasi, konsolidasi, dan berkelanjutan baik program pusat, daerah dan desa. (2) upaya percepatan penanggulangan stunting menerapkan 8 (delapan) kegiatan konvergensi, salah satunya yakni, meningkatkan cakupan intervensi gizi terintegrasi baik dalam upaya pencegahan maupun dalam mengatasi *stunting* yang didukung dengan sistem pengelolaan data stunting yang memadai di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. (3) untuk melaksanakan aksi konvergensi yang dibentuk sekretariat badan tim ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati, guna melakukan koordinasi dengan mengagendakan percepatan penanggulan *stunting* di masing-masing tingkatan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep juga sudah melakukan kegiatan

inovatif seperti sosialisasi pemanfaatan pekarangan dalam rangka penanaman *Cabbi Peddhes* (cabai pedas) yang bermanfaat mencegah anemia pada ibu hamil (bumil) untuk peningkatan bayi agar sehat dan cerdas, juga memberikan pendampingan Bumil Kurang Energi Kronis (KEK) di bawah dua tahun (Baduta), menyelenggarakan kelas Bumil, membuat Satgas Penting (Satuan Tugas Peduli Stunting), membuat kelompok Geliz (Gerakan Peduli Gizi), dan Launching Kampanye cegah Stunting di Pulau Oksigen (Gili Yang) pada tahun 2018.

Sehingga dengan beberapa sumber yang di dapat Kabupaten Sumenep mampu malakukan penurunan angka stunting selama lima tahun terakhir, terbukti pada tahun 2013 mencapai angka 52,5 persen pada tahun 2018 mencapai angka 34,3 persen sedangkan untuk tahun 2019 Kabupaten Sumenep masih belum memiliki data keseluruhan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi peraturan bupati no. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan stunting, Dengan penelitian ini, juga dapat memberikan dampak kepada masyarakat Kabupaten Sumenep agar dapat mengantisipasi terjadinya *stunting*.

Berdasarkan beberapa hal yang telah di paparkan di atas maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Implementasi Peraturan bupati No. 14 tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep**. Penelitian ini dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kesehatan dapat menangani stunting di Kabupaten Sumenep.

2. TINJAUAN TEORITIS

Implementasi kebijakan menurut Mulyadi (2018:24) merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara karena tidak dilaksanakan. Gordon dan pasolong pun mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan pada realisasi program dalam hal ini administrator yang mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.

Menurut Mazmanian dan Sabtier dalam Mulyadi (2018: 70). Menjelaskan ada tiga Variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni:

1. Karakter dari masalah (*tractability*)

of the problem) indikatornya:

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
 - c. Proporsi dari kelompok sasaran.
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang di harapkan.
2. Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of stute to structure implementaion*) indikatornya:
- a. Kejelasan kebijakan
 - b. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut
 - c. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - d. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan masalah.
 - e. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*) indikatornya:
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
 - c. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan

implementator.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menurut Creswell (2009) merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial, yang mana di dalamnya terdapat proses pengajuan pertanyaan kepada narasumber, pengumpulan, analisis, dan menafsirkan makna dari data-data yang diperoleh. Informan dari penelitian ini diperoleh dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kualitas data divalidasi menggunakan teknik triangulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik dari Masalah

Dalam rangka percepatan penanggulangan *stunting*, pemerintah daerah bersama dengan salah satu OPPD terkait yaitu Dinas Kesehatan telah bekerjasama untuk terus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif khususnya di Kabupaten Sumenep Melalui beberapa program dan kegiatan yang sudah akan dan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, dengan

melakukan kegiatan inovatif seperti sosialisasi pemanfaatan pekarangan dalam rangka penanaman *cabbi peddes* (cabai pedas) dalam gal ini yang bermanfaat mencegah anemia pada ibu hamil untuk meningkatkan bayi agar sehat dan cerda, juga memberikan pendampingan Bumil Kurang Energi Kronis dibawah dua tahu. Yang mana kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan utama yakni supaya tidak ada lagi ibu yang melahirkan anak stunting, juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif kedepannya.

Penanggulangan stunting sebenarnya sudah dilakukan semenjak tahun 2013, dimana Sumenep dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2013 kasus gizi buruk mencapai 144, tahun 2015 menurun menjadi 71, dan pada tahun 2016 menurun menjadi 46 kasus, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 42, dan tahun 2018 34 kasus, terbukti bahwa Sumenep berhasil menurunkan angka stunting selama lima terakhir. Stunting juga sudah menjadi masalah nasional bahkan internasional oleh karena itu pemerintah daerah membuat kebijakan tentang percepatan penanggulangan stunting karena merupakan program

wajib bagi semua daerah. Bahkan pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi untuk mencegah adanya stunting. Ada dua tingkat kesulitan teknis masalah yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal yakni :

1. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas terkait dibuktikan dari masih adanya masyarakat yang masih belum mengetahui adanya peraturan bupati tentang peangulangan *stunting*.
2. Pemantauan yang masih dilakukan satu bulan satu kali seperti yang dilakukan di beberapa puskesmas- puskesmas di beberapa desa yang menjadi lokus *stunting*.
3. Tidak adanya akses makanan sehat seperti, pemerian makan tambahan (PMT), pemberian makanan makanan bayi dan anak (PMBA).
4. Informasi yang diberikan oleh informan masih belum valid
5. Sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat awam

Tingkat kesulitan eksternal seperti :

1. lingkungan yang kurang bersih, biasanya seperti masyarakat yang miskin atau masyarakat yang

hidup di pelosok desa.

2. Nikah usia dini, biasanya remaja putri yang kurang paham tentang bagaimana menjaga kesehatan agar tidak menjadi ibu hamil yang kekurangan energi kronis (KEK) sehingga rentan melahirkan anak stunting.

Masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program yang diimplementasikan, jadi tingkat keberhasilan sebuah kebijakan tergantung pada masalah-masalah sosial yang ada jika, masalah sosial semakin besar maka tolak ukur keberhasilan semakin sulit tercapai karena persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah.

B. Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang

Karakteristik kebijakan adalah kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi

kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. jadi dalam karakteristik kebijakan berperan aktif bagaimana kejelasan kebijakan maka dapat memahami dengan mudah dan melaksanakan dengan mudah.

Kejelasan dari isi Peraturan tentang penanggulangan stunting tersebut sudah jelas berdasarkan pada bab 3 pasal 5 dimana percepatan penanggulangan stunting dilakukan melalui 5 pilar yang mencakup yaitu Komitmen dan visi misi pimpinan daerah, Kampanye dengan fokus pada pemahaman perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas, Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat, Mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi serta Pemantauan dan evaluasi . Adapun komitmen dari pemerintah itu mencakup konsistensi berupaya untuk mewujudkan percepatan penanggulangan *stunting*, Komitmen tersebut dijadikan peraturan prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep dan upaya percepatan penanggulangan *stunting* wajib menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

C. Variabel Lingkungan

Kondisi sosial ekonomi dan teknologi, perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang di gariskan dalam suatu peraturan. Karena itu eksternal faktor juga menjadi hal penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ariyanti, S.ST selaku Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi bahwasanya kondisi sosial ekonomi dan teknologi masyarakat Sumenep masih di katakan sangat tertinggal seperti Minimnya mediasi sosialisasi berupa informasi teknologi yang masih belum sampai ke pelosok desa dan masyarakat yang masih tidak mengetahui teknologi modrn, pemantauan yang masih dilakukan satu bulan satu kali seperti yang dilakukan di beberapa puskesmas-puskesmas di beberapa desa yang menjadi lokus *stunting*. Tidak adanya akses makanan sehat seperti, pemerian makan tambahan (PMT), pemberian makanan makanan bayi dan anak (PMBA). Jadi permasalahan di lingkungan sosial ekonomi dan teknologi ini lah yang meperlambat

waktu dalam melakukan percepatan dari kebijakan tersebut.

5. PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1) Karakteristik Kebijakan
 - a. Tingkat kesulitan dari masalah, pelaksanaan preraturan tersebut memlikidua tingkat kesulitan, yaitu tingkat kesulitan internal seperti minimnya mediasi sosialisasi, teknis pemantauan yang masih dilakukan dengan skala waktu yang lama. Adapun tingkat kesulitan eksternal yakni kurangnya kesadaran dari masyarakat awam dan sulitnya mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam pencegahan dan penanggulan *stunting*,
 - b. Tingkat kemajemukan, tingkat keberagaman masyarakat sumenep yang masih berbeda-beda juga sehingga sulit mengubah perilaku masyarakat.
 - c. Tingkat komitmen aparat; tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan-pekerjaan program kebijakan masih rendah, terbukti dengan pemantauan yang masih dilakukan sat

bulan satu kali.

2) Karakteristik Kebijakan

- a. Kejelasan kebijakan; kejelasan isi peraturan ini sudah tertera pada bab 3 pasal 5 mengacu pada 5 pilar yang mencakup komitmen visi misi dll.
- b. Kejelasan dan konsistensi yang ada pada badan pelaksana; isi kebijakan yang sudah jelas dan konsistensi dengan menacu pada SOP yang ada jua menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak
- c. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan; adanya partisipasi para aktor luar badan pelaksana yang telah mendukung dari tujuan peraturan seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kelautan dan lainnya, yang merupakan sasaran intervensi gizi sensitif yaitu berupa kegiatan di luar sektor kesehatan.

3) Variabel Lingkungan

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; pengaruh faktor luar dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan pada peraturan memiliki tingkat keberhasilan pada pelaksanaan implementasi seperti pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumenep yang masih tertinggal biasanya terjadi pada masyarakat awam atau masyarakat yang masih tinggal di pelosok Desa.
- b. Dukungan publik terhadap kebijakan, masyarakat yang memiliki hakikat perhatian dalam mendorong tingkat keberhasilan implementasi peraturan tersebut dan masyarakat Sumenep sangat mendukung dengan adanya kebijakan tersebut.
- c. Sikap yang di inginkan oleh kelompok pemilih; sikap yang di inginkan oleh masyarakat Sumenep yaitu adanya perubahan-perubahan yang harus dicapai oleh pemerintah dan komitmen aparat untuk mempercepat penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sumenep.

B. SARAN

1. Diharapkan Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan untuk mengembangkan informasi teknologi kepada masyarakat Sumenep
2. Diharapkan Pemerintah memberikan tim khusus untuk pemantauan ke semua puskesmas-puskesmas yang menjadi daerah lokus *stunting*
3. Diharapkan pemerintah memberikan fasilitas memadai berupa alat kebersihan untuk lingkungan masyarakat
4. Diharapkan pemerintah melakukan pemberian edukasi yang intens kepada remaja- remaja putri yang akan menginjak ke jenjang pernikahan
5. Diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang memiliki masalah kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono, Leo, 2017, *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya, 2012, *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka setia.
- Mulyadi, Deddy. 2018. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto Agus E, Sulistyawanto Ratih Dyah, 2015, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : GAVA MEDIA
- Subarsono, AG, 2015, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustakan Pelajar.
- Sedermayanti, 2017, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiono, 2018. *Metode Penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan RAD*. Bandung.: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).

Wahab, Solichin, 201, *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta ; PT Bumi Aksara

Undang-Undang

Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor : 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting*.

Jurnal

Fauzi Muhammad. 2018. Evaluasi pelaksanaan Gizi yang Berkaitan dengan Kejadian *Stunting* (Tubuh pendek) di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Kesehatan Indra Husada*:6(1)

Ratri, Kartika, Dewi. 2014. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB*.

Sulastianingsih. 2018. ASI Eksklusif dan Berat Lahir Berat Lahir Berpengaruh terhadap *Stunting*

pada Balita 2-5 tahun di Kabupaten Pesawan. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*:15(2).

Saputri, Archda, Rini. 2019. Upaya pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Tunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*: 2(2)

Surya, pratama. 2019. Implementasi Gasing (gerakan *stunting*) Melalui PHBS dan Pemeriksaan Cacing. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*: 2(1)

Website

Mahdi, Imam. 2019. Penurunan Angka *Stunting* di Sumenep Capai 18,2 Persen. [Kabarmadura.id/penurunan-angka-stunting-di-kabupaten-sumenep-capai-182-persen/](https://kabarmadura.id/penurunan-angka-stunting-di-kabupaten-sumenep-capai-182-persen/). (2 desember 2019).

Nursanti, Ani. 2019. *Stunting* Salah Satu Faktor Rendahnya Kualitas SDM. <https://www.pikiran-rakyat.com/advertorial/pr-01315126/stunting-salah-satu-faktor-rendahnya-kualitas-sdm> (11 juli 2019).

Pemerintah, Kabupaten, Sumenep. 2019. Bupati Kabupaten Sumenep

Tercepat Tangani *Stunting* di Indonesia.

[Sumenepkab.go.id/berita/baca/bupati-kabupaten-sumenep-tercepat-tangani-stunting-di-indonesia](http://sumenepkab.go.id/berita/baca/bupati-kabupaten-sumenep-tercepat-tangani-stunting-di-indonesia). (28 November 2019).

dannegara-indonesia (12 november 2019).

Prasetyo, Budi. 2019. Khofifah Sumenep, Kabupaten Terbanyak kasus *Stunting* di jatim. <https://m.kbr.id/nusantara/08-2019/khofifah-sumenep-terbanyak-kasus-stunting>. (16 agustus 2019).

Pinandito, Mego. 2018. WNPg XI Soroti Percepatan Penurunan Angka *Stunting* untuk SDM Indonesia yang Berkualitas. <http://lipi.go.id/berita/wnp-g-xisoroti-percepatan-penurunan-angkastunting-untuk-sdm-indonesia-yangberkualitas/> (01 Februari 2018).

Rukayyah. 2018. Sumenep Jadi Proyek Penanganan *Stunting* Nasional. [Rri.co.id/post/berita/518868/daerah/sumenep-jadi-proyek-penanganstunting-nasional](http://rri.co.id/post/berita/518868/daerah/sumenep-jadi-proyek-penanganstunting-nasional). (24 april2018).

Sigilipo, Tito. 2019. Info Grafik: Tekan *Stunting* Tingkatkan Kualitas SDM. <http://theconversation.com/empatdampak-stunting-bagi-anak->